

ABSTRAK

Pembentukan *holding* BUMN Migas bertujuan untuk meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha pada BUMN. Pembentukan *holding* BUMN migas diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Pemyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan perseroan PT (Persero) Pertamina. Dalam pembentukan *holding* terjadi proses transformasi saham negara pada PT (Persero) PGN Tbk. Salah satu akibat transformasi saham adalah perubahan status BUMN Persero menjadi perusahaan non-BUMN. Untuk mengetahui akibat transformasi saham negara dan perubahan pengendalian negara terhadap BUMN pasca transformasi saham pada pembentukan *holding* migas, peneliti melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian doctrinal research. Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan dan memberi preskripsi mengenai isu hukum yang dikaji. Dalam *holding* BUMN Migas terdapat pengendalian negara terhadap PT (Persero) PGN Tbk melalui saham seri A Dwiwarna. Akibat transformasi saham, dapat diketahui adanya perubahan model pengendalian negara yang semula secara langsung sebagai pemegang saham mayoritas menjadi secara langsung sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna dan secara tidak langsung melalui induk BUMN yang dikendalikan langsung oleh negara.

Kata kunci: Transformasi saham, Perubahan Pengendalian Negara, Holdingisasi BUMN migas